



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAYAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM
3. NHK : 144753

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/45 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 8960 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 237.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 TRD A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 221.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 199.983.200



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	113.469.105
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.160.952.305
III. HUTANG	Rp.	154.924.477
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.006.027.828

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.